

## **Stakeholder Engagement dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Lokal: Pengalaman dari Desa Panggungharjo**

### ***Stakeholder Engagement in Locally-Based Waste Management: Experience from Panggungharjo Village***

Varellian Dzaldiva Artamevia<sup>1</sup>, Pandhu Yuanjaya<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>2</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

#### INFORMASI ARTIKEL

##### Article history:

Diterima 22-07-24

Diperbaiki 23-07-24

Disetujui 25-07-24

##### Kata Kunci:

Keterlibatan Pemangku  
Kepentingan, Pengelolaan,  
Sampah.

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah berbasis lokal di Desa Panggungharjo. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis lokal di Desa Panggungharjo memiliki keterlibatan pemangku kepentingan yang integratif. Integrasi keterlibatan pemangku kepentingan ini terbukti melalui pemenuhan penyelidikan hubungan setiap pemangku kepentingan, komunikasi setiap pemangku kepentingan, pembelajaran dengan pemangku kepentingan dan integrasi yang terjalin antar pemangku kepentingan. Pemerintah Desa Panggungharjo menjadi inisiator dengan melibatkan aktor dari pemerintah daerah, swasta, LSM dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam pengelolaan sampah berbasis lokal di Desa Panggungharjo. Pengelolaan sampah di Desa Panggungharjo menunjukkan keterlibatan yang kompleks dari proses internalisasi kewajiban yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan. Selain itu, bentuk keterlibatan juga menunjukkan adanya hubungan resiprokal dan non resiprokal. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan dalam hal komunikasi dan strategi meningkatkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah di Desa Panggungharjo.

#### ABSTRACT

##### Keywords:

***Stakeholder Engagement,  
Management, Waste***

*This study aims to analyze stakeholder engagement in local waste management in Panggungharjo Village. This research employs a descriptive study with a qualitative approach. The data collection techniques used in this research are interviews, observation and documentation. The results show that local waste management in Panggungharjo Village involves integrative stakeholder engagement. This integration is demonstrated through the fulfillment of stakeholder relationship inquiries, stakeholder communication, stakeholder learning, and the established integration among stakeholders. The Panggungharjo Village Government initiated this by involving actors from the local government, private sector, NGOs, and the community to collaborate in local waste management in Panggungharjo Village. The waste management in Panggungharjo Village demonstrates complex involvement through the internalization of responsibilities held by each stakeholder. Additionally, the involvement also shows reciprocal and non-reciprocal relationships. Therefore, improvements in communication and strategies to increase the involvement of all stakeholders in waste management in Panggungharjo Village are necessary.*

## 1. Pendahuluan

Permasalahan sampah menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Sampah terbentuk dari aktivitas produksi masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Segala upaya telah dilakukan untuk mengurangi timbunan sampah yang semakin menumpuk. Berdasarkan data yang dihimpun pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia tahun 2023, Indonesia memiliki timbunan sampah sebanyak 17.441.415,28 ton per tahun dengan pengelolaan sampah telah mencapai 66,47%. Pemerintah telah berupaya untuk meregulasi penanganan sampah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Amanat dari peraturan ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus diatur sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Permasalahan persampahan tidak hanya menjadi masalah negara tetapi juga oleh kabupaten/kota di Indonesia. Seperti pada Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih memiliki tugas dalam penyelesaian sampah. Di DIY, rata-rata sampah pada tahun 2022 mencapai 1.231,55 ton per hari. Naik turunnya volume sampah selama empat tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi. Tingkat penanganan sampah pun tak sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara pengelolaan dengan produksi yang berlebihan. Apabila sampah tidak teratasi dengan baik, maka akan menimbulkan permasalahan baru.

Peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk mengatur regulasi tentang sampah agar dapat mengurangi persoalan negatif tentang timbunan sampah. Penyelesaian tentang sampah dilakukan mulai secara nasional hingga melibatkan seluruh masyarakat. Namun peraturan tentang sampah di Indonesia kurang berdampak pada masyarakat. Temuan dalam penelitian [1] menjelaskan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam praktik pengelolaan sampah.

Pendekatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat diimplementasikan di berbagai wilayah di seluruh dunia serta memiliki potensi untuk mendorong usaha-usaha yang lebih berkelanjutan dan menjaga ketahanan lingkungan [2]. Dengan menerapkan pendekatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat secara mandiri menggunakan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dari kelompok masyarakat terkecil dapat menciptakan nilai ekonomis, lebih bersaing dalam konteks industri dan mendukung keberlanjutan lingkungan [3]. Namun, pemangku kepentingan yang beragam menciptakan perbedaan kepentingan yang ingin dicapai. Dalam proses pengelolaan sampah memerlukan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan. Menurut [4] menjelaskan bahwa masalah yang timbul pada pelibatan *stakeholder* dalam penanganan sampah meliputi kerawanan konflik pada penanganan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dan tidak adanya kerja sama atau koordinasi dinas lintas sektoral.

Desa Panggungharjo memiliki Tempat Pengolahan Sampah 3R bernama KUPAS. Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS) merupakan kelompok usaha yang bergerak di bidang pengelolaan sampah. Unit KUPAS berada di bawah Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari yang memfokuskan usaha pada pengelolaan lingkungan. Dalam kaitannya dengan *stakeholder*, aktor yang cukup terasa dalam pengembangan TPS ini adalah Pemerintah Desa. Hal ini karena pengelolaan TPS3R KUPAS berada di bawah BUMDES. Sedangkan pemerintah kabupaten hanya melakukan pengawasan dalam beberapa waktu dan jarang

melakukan kontribusi secara langsung di lapangan (Wawancara, 19 Januari 2024). Humas TPS3R KUPAS menjelaskan bahwa KUPAS masih belum dapat dikatakan mandiri karena pendapatan yang didapatkan oleh KUPAS masih minus dalam angka pendapatan laba bersih 80 juta per bulan (Wawancara, 28 Februari 2024).

Dari beberapa penelitian yang dilakukan, masih terdapat *research gap* seperti kurang ditelitinya keterlibatan pemangku kepentingan dalam kaitannya pengelolaan sampah berbasis lokal. Pada penelitian Pratiwi (2018) [5] menemukan permasalahan terkait dana yang belum dapat teratasi dengan adanya pemangku kepentingan. Penelitian Wiesmeth (2018) [6] menjelaskan bahwa stakeholder engagement dapat menghasilkan inovasi dan tanggungjawab manajemen dalam studi kasus di Jerman. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki fokus pada keterlibatan pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan dalam mengatasi sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah 3R di Desa Panggungharjo. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah berbasis lokal di Desa Panggungharjo. Konsep keterlibatan pemangku kepentingan selaras dengan konsep *stakeholder engagement* untuk mengidentifikasi keterlibatan antar aktor di Desa Panggungharjo. Penelitian ini menggunakan teori *Stakeholder Engagement* dari Freeman, et al. (2017) [7]. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu Administrasi Publik, bagi peneliti, bagi swasta hingga masyarakat.

## 2. Metode Penelitian

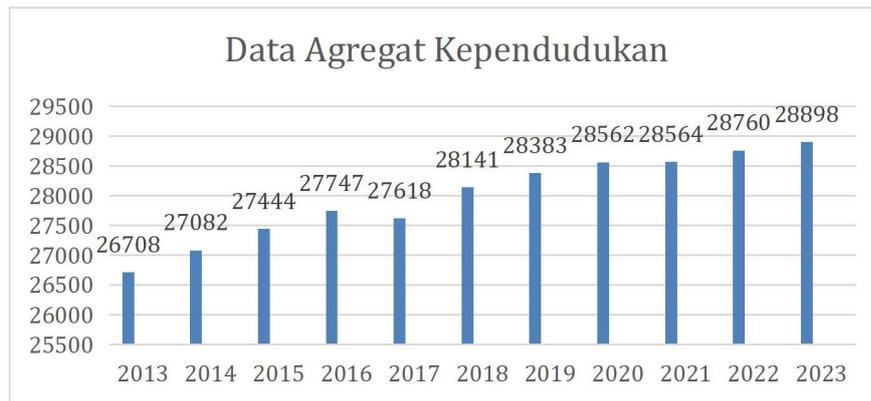
Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis pendekatan untuk menjelaskan, mendalami, dan mengerti arti masalah yang dimiliki oleh sejumlah orang atau sekelompok orang [8]. Penelitian dilakukan di Tempat Pengolahan Sampah 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) yang berada di Desa Panggungharjo, Kelurahan Panggungharjo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Yayasan Pembangunan Citra Insan Indonesia dan PT. Pegadaian Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilakukan sejak Maret 2024 – Juni 2024. Instrumen kunci pada penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri [8]. Peneliti sebagai instrumen utama mengumpulkan data dari lapangan untuk mengetahui keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah di Desa Panggungharjo melalui Tempat Pengolahan Sampah berbasis 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*). Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data meliputi, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Desa Panggungharjo merupakan wilayah sub-urban yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta. Sebagai area yang berbatasan secara langsung dengan wilayah perkotaan Yogyakarta, Desa Panggungharjo tergolong dalam aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang juga memiliki kepentingan strategis dalam bidang

ekonomi. Sebelah utara desa berbatasan dengan Kota Yogyakarta. Sebelah timur desa berbatasan dengan Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon dan Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan. Berdasarkan data agregat kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023, rata-rata penduduk di Desa Panggungharjo mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, Desa Panggungharjo memiliki 28.898 jiwa penduduk, yang terdiri dari 14.411 laki-laki dan 14.487 perempuan. Pada tahun 2023, Desa Panggungharjo memiliki jumlah Kartu Keluarga mencapai 10.133. Dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat peningkatan jumlah penduduk sebesar 0,02%.

Namun ternyata jumlah kepala keluarga mengalami penurunan dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Pada tahun 2023, jumlah kepala keluarga di Desa Panggungharjo mencapai angka 10.133 kepala keluarga. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah kepala keluarga mencapai 10.201 kepala keluarga. Jumlah kepala keluarga memayungi jumlah keluarga di dalamnya dan memiliki potensi konsumsi. Potensi konsumsi tersebut yang menyebabkan adanya timbunan sampah setiap hari.



**Gambar 1. Data Agregat Kependudukan Desa Panggungharjo**

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Pengelolaan sampah berbasis lokal merupakan sebuah cara reduksi sampah yang memanfaatkan potensi wilayah untuk membantu mengelola sampah yang ditimbulkan. Tujuan dari pengelolaan sampah berbasis lokal adalah untuk mengurangi penumpukan sampah yang terjadi di tempat pembuangan akhir. Selain itu, adanya pengelolaan sampah memberikan peluang untuk memberdayakan masyarakat lokal agar memiliki keterampilan dalam bekerja dan membantu memperoleh kehidupan yang layak. Seperti pada Desa Panggungharjo yang telah 10 tahun mengembangkan pengelolaan sampah berbasis lokal yang diberi nama Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle Kelompok Usaha Pengelola Sampah (TPS 3R KUPAS).

Dalam integrasi pengelolaan sampah di Desa Panggungharjo, skema pengolahan sampah dilihat dari hulu, tengah, dan hilirnya. Peran ketiga aspek tersebut dimanfaatkan sebagai usaha mengelola sampah. Dari tingkat hulu, peran masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pengelolaan sampah secara bijak dari

lingkup rumah tangga. Rumah tangga menjadi penghasil sampah lini terkecil di masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan rumah tangga untuk membantu proses reduksi sampah menjadi penting. Pada tingkat hulu, masyarakat diberdayakan dengan adanya pendirian bank-bank sampah di tingkat RT/RW. Di Panggunharjo, total bank sampah aktif yang termasuk dalam bank sampah unit dan sedekah sampah binaan KUPAS sebanyak 28 unit. Dari angka tersebut, bank sampah tersebar di seluruh RT/RW. Masyarakat dapat tergabung menjadi anggota bank sampah untuk menukarkan sampah mereka menjadi saldo uang atau emas. Sebelum sampai ke bank sampah, sejak dari rumah masyarakat telah memilah sampah mereka sesuai dengan jenis sampah. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemilahan dan menghargai besaran setiap jenis sampah. Melihat potensi masyarakat dan bank sampah yang krusial membuat desa kemudian meningkatkan keterlibatan untuk menciptakan pengelolaan sampah yang lebih baik.

Pada tingkat tengah, Pasti Angkut berperan sebagai pelayanan pengangkutan sampah yang terkoneksi dengan KUPAS. Pasti Angkut merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengangkutan sampah melalui aplikasi. Masyarakat yang berlangganan dengan Pasti Angkut akan dijemput sampahnya dengan retribusi Rp1000 per kilogram. *Transporter* yang membawa sampah tersebut akan membawa sampah ke KUPAS untuk dilakukan penimbangan. Proses penimbangan akan dilakukan dari pihak Pasti Angkut melalui aplikasi dan penimbangan oleh KUPAS melalui jembatan timbang. Selain itu, entitas pengangkutan yang tidak dapat dihilangkan adalah pengangkut sampah mandiri. Pengangkut sampah mandiri biasanya memiliki pelanggan sendiri dan mengatur pengambilan secara mandiri. Sebagian PSM di Desa Panggunharjo terafiliasi oleh KUPAS, tetapi sebagian lain tidak.

Apabila berbicara mengenai proses pelaksanaan pengolahan sampah di TPS 3R KUPAS membutuhkan sistem manajemen dan teknis dalam pengelolaannya. KUPAS memiliki kantor manajemen yang mengurus tentang pengelolaan dana, kehumasan, SDM, pengadaan kebutuhan rumah tangga hingga edukasi dan sosialisasi. Tim manajemen ini digunakan sebagai cara mengatur proses pelaksanaan TPS 3R KUPAS sebagai bentuk profesionalitas dalam mengelola lingkungan berbasis komunal. Dalam tim manajemen dilakukan juga proses penggajian dan aktivitas sosial lainnya yang membutuhkan koneksi antar setiap karyawan di KUPAS. Selain tim manajemen, KUPAS memiliki tim teknis yang mengurus langsung terkait pengolahan sampah. Pada tim teknis, terdapat pemisahan kembali antara tim pemilahan dan tim daur ulang. Tim pemilahan akan memilah sampah yang masih tercampur yang sebelumnya dikirim oleh pelanggan KUPAS dan Pasti Angkut. Tim pemilahan akan berada di atas conveyer yang berjalan dan memilah sampah sesuai dengan jenisnya tetapi masih belum terkonsentrasi secara detail. Hasil yang didapatkan tim pemilahan adalah bahan anorganik, organik, dan residu. Bahan anorganik akan dikirim ke tim daur ulang, bahan organik akan masuk mesin cacah pilah dan menjadi bubur organik, sedangkan bahan residu akan dipisahkan dan masuk antrian insinerator. Untuk tim daur ulang, pemisahan akan dilakukan sesuai dengan bahan yang telah dibedakan sesuai dengan jenisnya.

Berdasarkan masalah pada penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan analisis indikator stakeholder engagement dari Freeman et al. (2017) [7] yang meliputi *examining stakeholder relation*, *communicating with stakeholder*, *learning with stakeholder*, dan *integrative stakeholder engagement*. Indikator ini terpilih karena sesuai dengan tujuan penelitian pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah berbasis lokal di Desa Panggungharjo.

### 3.1 Examining Stakeholder Relation

Dalam penyelidikan hubungan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah di KUPAS sebenarnya Desa Panggungharjo telah melakukan upaya penyelidikan untuk membantu proses pengelolaan dengan menilai kepentingan yang ada di setiap stakeholder. Setiap stakeholder memiliki visi dan misi yang berbeda tetapi ada kesamaan tujuan yaitu ingin berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Upaya penyelidikan ini dilakukan tidak terlepas dari peran kepada desa. Hubungan awal adanya interaksi kerja sama memang berawal dari kepala desa. Pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proyek konstruksi publik adalah untuk menangani masalah oposisi dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan [9]. Penciptaan nilai ini terlihat dari hubungan stakeholder yang telah berjalan sampai saat ini masih sesuai dengan tujuan awal mereka bergabung dalam pengelolaan sampah di Desa Panggungharjo. Penulis melihat awal hubungan setiap stakeholder di Desa Panggungharjo didasarkan untuk pemenuhan tanggung jawab dari setiap stakeholder dan kepentingan yang dibawa oleh masing-masing stakeholder di TPS 3R KUPAS.

### 3.2 Communicating with Stakeholder

Komunikasi keterlibatan pemangku kepentingan yang baik berguna bagi perusahaan untuk menunjukkan sejauh mana pemangku kepentingan terlibat, kemampuan manajer untuk merespons kekhawatiran mereka, dan hasil yang dicapai ketika pemangku kepentingan terlibat dalam proses pengambilan keputusan [10]. Penulis melihat pentingnya diskusi melalui rapat sebagai cara penggabungan pemikiran baik dari lingkup internal KUPAS sendiri. Dalam diskusi, setiap orang dapat menyuguhkan pemikiran masing-masing sebagai bahan pertimbangan kebijakan atau keputusan yang akan dibuat setelahnya.

Berdasarkan komunikasi yang berjalan dalam pengelolaan sampah berbasis lokal di Desa Panggungharjo memiliki karakteristik komunikasi masing-masing. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek prioritas komunikasi ternyata tercermin dari elemen tertinggi hingga terendah. Hasil penelitian membuktikan strategi komunikasi menurut [11] bahwa penggunaan alat komunikasi dilakukan untuk memudahkan komunikasi menjadi lebih sederhana. Penulis juga melihat adanya bahasan yang komunikatif dari dua arah dengan membahas kegiatan yang dilakukan, kendala yang terjadi serta solusi yang diharapkan. Penulis melihat walaupun dilakukan dengan daring, komunikasi cukup efektif terlihat karena adanya koreksi dari masing-masing stakeholder. Setidaknya komunikasi dengan pemangku kepentingan melalui media seperti laporan berkelanjutan menawarkan

jalur penting untuk mengungkapkan dampak perusahaan baik positif maupun negatif sehubungan dengan pembangunan berkelanjutan [12].

### *3.3 Learning With Stakeholder*

Pemahaman mengenai pemangku kepentingan memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan yang bersifat instrumental, orientasi pemangku kepentingan, asumsi perilaku dan hubungan manajerial [13]. Penulis menyimpulkan bahwa pembelajaran dari stakeholder di Desa Panggungharjo dalam pengelolaan sampah sebenarnya telah tercermin melalui penyampaian sudut pandang yang dilakukan. Keterbukaan penyampaian evaluasi terlihat dari KUPAS sebagai tempat pengelolaan sampah berbasis lokal di Desa Panggungharjo yang membuka kesempatan dari semua pihak untuk memberikan saran dan masukan. Hasil dari adanya pembelajaran yang berjalan dengan pihak swasta ternyata menyimpulkan bentuk capaian pekerjaan KUPAS sebagai “tiket” bantuan yang diberikan. Apabila capaian target terpenuhi, maka bantuan lain akan diberikan karena menunjukkan adanya produktivitas dan kenaikan hasil. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat [14] bahwa evaluasi dapat memudahkan pengelolaan yang lancar.

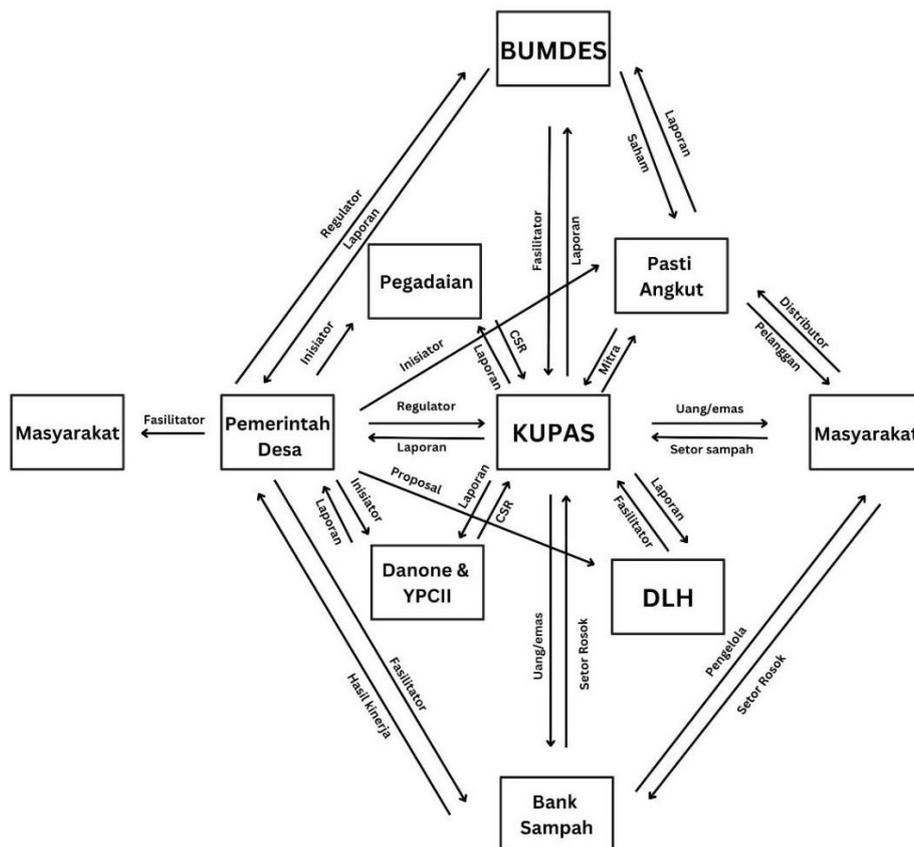
Penulis melihat pola interaksi Desa Panggungharjo dengan pihak swasta memberikan timbal balik yang positif dalam merespon permasalahan pengelolaan sampah. Konsep pemangku kepentingan mempersonalisasi tanggung jawab sosial atau kemasyarakatan dengan merinci kelompok atau individu tertentu yang harus dipertimbangkan oleh bisnis dalam orientasi CSR-nya [15]. Adanya proses pemantauan dan evaluasi menghasilkan sudut pandang yang dapat memberikan ide-ide lain dari setiap pemangku kepentingan. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan sebagai cara efektif dalam penyelesaian masalah yang ada. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pendapat [16] bahwa proses pemantauan dan evaluasi partisipatif tidak sekedar tentang penggunaan teknik-teknik partisipatif dalam pengaturan pemantauan dan evaluasi konvensional, tetapi lebih merupakan pendekatan yang menyeluruh dalam melaksanakan tugas.

### *3.4 Integrative Stakeholder Engagement*

Variasi di antara setiap pemangku kepentingan dimaksudkan sebagai cara untuk mengatasi kekurangan dalam kebijakan. Keterlibatan yang menyeluruh diadopsi sebagai tanggung jawab kepada masyarakat dalam memberikan layanan yang baik. internalisasi kewajiban pada setiap pemangku kepentingan diperlukan untuk memahami peran yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan program. Berdasarkan pandangan integratif, para kontributor dalam hal ini adalah pemangku kepentingan menawarkan konseptualisasi baru dan praktik manajerial berdasarkan studi mendalam dari kasus empiris [7]. Berdasarkan hasil temuan penelitian, internalisasi kewajiban setiap stakeholder telah terlihat dari pemahaman tugas dan fungsi stakeholder dalam pengelolaan sampah berbasis lokal di Desa Panggungharjo. Konsep yang ditawarkan Lurah Desa Panggungharjo adalah melihat dari rantai nilainya. Desa Panggungharjo melihat sudut pandang dari hulu, tengah, dan hilir. Masing-masing sudut pandang tersebut

memiliki tugas dan karakteristik tertentu dalam pengelolaan sampah berbasis lokal.

Alur keterlibatan pada gambar diatas menunjukkan adanya hubungan resiprokal antara masing-masing stakeholder. Pengelolaan sampah di Desa Panggungharjo menunjukkan keterlibatan yang kompleks dari proses internalisasi kewajiban yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan. Hubungan timbal balik ini terjadi atas dasar kepentingan dan motivasi yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan. Dalam gambar tersebut, terlihat bahwa KUPAS berdiri sebagai pengikat setiap stakeholder untuk bekerja sama dalam pengelolaan sampah berbasis lokal di Desa Panggungharjo. KUPAS berwenang dalam mengatur operasional dan manajemen yang berjalan selama proses pengelolaan sampah. Seluruh stakeholder yang terlibat memberikan bentuk kerja sama mereka yang bertujuan untuk mengembangkan proses pengelolaan sampah berbasis lokal di Desa Panggungharjo. Oleh karena itu, KUPAS lebih banyak memberikan laporan terkait kegiatan yang berjalan dari hasil kerja sama tersebut kepada setiap pemangku kepentingan.



**Gambar 2. Alur Stakeholder Engagement dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Lokal di Desa Panggungharjo**

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Pada gambar tersebut juga terlihat bentuk kerja sama non resiprokal atau satu arah. Pemerintah desa disini memiliki hubungan non resiprokal terbanyak dengan setiap pemangku kepentingan. Peneliti melihat hubungan satu arah terjadi karena inisiasi pemerintah desa dalam membentuk hubungan kerja sama sebagai upaya kolaborasi dengan setiap pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengelolaan sampah di Desa Panggungharjo. Pemerintah menjadi inisiator melalui kerja sama dengan aktor swasta untuk bekerja sama dalam CSR perusahaan. Sedangkan dengan DLH, pemerintah memberikan proposal sebagai bentuk kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah.

Di Desa Panggungharjo, sampah telah dikelola secara komunal pada tingkat wilayah oleh masyarakat. Penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) telah dilakukan baik di KUPAS maupun tingkat rumah tangga. Proses reduce dilakukan dengan upaya sosialisasi dari KUPAS dan dibuktikan dengan pengurangan sampah residu dan anorganik. Proses reuse dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan barang bekas menjadi barang bermanfaat. Sedangkan recycle dilakukan dengan mendaur ulang sampah menjadi produk bubuk organik dan pupuk.

Desa Panggungharjo telah melakukan usaha besar dalam melibatkan setiap pemangku kepentingan dalam menangani masalah sampah. Pengelolaan sampah berbasis lokal membentuk anggotanya saling memahami dan memperoleh manfaat ekonomi, menjalankan bisnis yang stabil, sehingga tercipta kesejahteraan bersama dalam pengelolaan sampah melalui penerapan ekonomi sirkular [17]. Selain itu, dampak dari adanya keterlibatan kerja sama CSR ternyata juga dapat memotivasi masyarakat melihat sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Kemampuan membangun relasi dengan aktor lain ternyata sejalan dengan hasil penelitian Kushadajadi dan Permana bahwa kepala desa memiliki kemampuan dalam “mengundang” pemangku kepentingan lain untuk bersama membangun desa [18].

Keterlibatan yang terjadi pada setiap stakeholder di Desa Panggungharjo menunjukkan persamaan tujuan pada pengelolaan sampah yang lebih baik. Keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif terdapat integrasi pandangan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan [19]. Melihat dari urgensi sampah di DIY saat ini dimana di beberapa titik wilayah menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, peran Lurah Desa Panggungharjo menjadi salah satu tonggak munculnya keterlibatan setiap stakeholder di Panggungharjo. Pada awal pembentukan TPS 3R KUPAS, lurah desa telah mengidentifikasi urgensi masalah yang ada di masyarakat pada awal periode kepemimpinannya. Walaupun memang terjadi integrasi pelibatan *stakeholder*, tonase sampah yang masuk ke KUPAS masih tinggi setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh masuknya sampah dari *corporate* dan sampah Kota Jogja ke KUPAS. Masuknya sampah *corporate* dan wilayah lain ke KUPAS ternyata didasari oleh kepentingan bisnis dalam perputaran ekonomi pada pengelolaan sampah di KUPAS. KUPAS memiliki kendala dalam sumber pendapatan sehingga KUPAS membuka kesempatan bagi wilayah lain untuk membuang sampah ke KUPAS. Selain itu jumlah pelanggan

KUPAS yang masih belum mencapai 50% juga menjadi alasan output pelibatan masyarakat masih belum optimal.

Capaian tersebut didapatkan dari hasil wawancara tiga narasumber yang menyebut bahwa sampah dari warga desa yang masuk ke KUPAS dibawah 50%. Peneliti melihat angka tersebut masih tergolong rendah dalam mencapai hasil pengelolaan sampah yang dapat selesai dari lingkup lokal, wilayah atau desa. Berdasarkan Gambar 6. Jumlah kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin Desa Panggungharjo pada tahun 2023 mencapai 10.133 KK. Sedangkan rata-rata jawaban tiga narasumber terkait jumlah sampah yang masuk dari warga desa berkisar 20%. Hal ini berarti rata-rata warga yang mengelola sampahnya di KUPAS adalah 2.027 KK.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil data penelitian, terdapat beberapa hal yang bisa disimpulkan dari penelitian ini. Berikut kesimpulan penelitian ini:

- a. Pengelolaan sampah berbasis lokal di Desa Panggungharjo menunjukkan adanya keterlibatan setiap pemangku kepentingan satu sama lain. Keterlibatan pemangku kepentingan ini terbukti melalui pemenuhan penyelidikan hubungan setiap pemangku kepentingan, komunikasi setiap pemangku kepentingan, pembelajaran dengan pemangku kepentingan dan integrasi yang terjalin antar pemangku kepentingan.
- b. Peran pemerintah desa disini sangat penting karena sebagai inisiator kerja sama dengan *stakeholder* lain. Bentuk keterlibatan komunikasi yang dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan bermacam-macam seperti pengawasan, diskusi, rapat, hingga sosialisasi. Namun terdapat pemangku kepentingan yang kurang aktif dalam hal komunikasi. Keterbukaan penyampaian evaluasi terlihat dari pemerintah desa yang membuka kesempatan dari semua pihak untuk memberikan saran dan masukan. Walaupun dalam proses evaluasi masih terdapat kerumitan dan muncul perbedaan pendapat, namun hal tersebut masih dapat teratasi dengan solusi yang ditawarkan kedua belah pihak. Terakhir adalah integrasi keterlibatan pemangku kepentingan yang dilakukan untuk menginternalisasi kewajiban setiap *stakeholder* didalamnya. Pemerintah desa telah mengupayakan integrasi keterlibatan pemangku kepentingan dengan membuat konsep rantai keterlibatan dengan memperhatikan hulu, tengah dan hilir.

#### Referensi

- [1] E. A. Kusuma, "Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Wisata Religi Banten Lama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah," *Prosiding*, p. 253–262. <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.132>, 2023.
- [2] A. L. Wynne, "A community-based approach to solid waste management for riverine and coastal resource sustainability in the Philippines.," *Ocean and Coastal Management*, p. 36–44. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2017.10.028>, 2018.

- [3] e. a. Natalia, "Pendampingan Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat dengan Konsep 3R di desa Sukaluyu," *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, vol. 4 , no. 1, pp. 21-26, 2021.
- [4] S. A. H. A. H. & M. N. Mulasari, "Mulasari, S. Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta Dan Kebijakan Penanggulangannya.," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, vol. 11, no. 2, p. 259, 2016.
- [5] D. A. E. Pratiwi, "Manajemen Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Panggunharjo," Skripsi, 2018.
- [6] H. Wiesmeth, "Stakeholder engagement for environmental innovations.," *Journal of Business Research*, p. 310–320 <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.12.054>, 2020.
- [7] R. E. K. J. S. S. & S. C. Freeman, "Stakeholder Engagement: Practicing the Ideas of Stakeholder Theory.," *Issues in Business Ethics*, pp. 1–12. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-62785-4\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-62785-4_1), 2017.
- [8] J. W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Pustaka Pelajar., 2013.
- [9] A. A. C. O. & R. M. Ebekozen, "A qualitative approach to investigate stakeholders' engagement in construction projects," *Benchmarking*, vol. 31(3), pp. 866–883. <https://doi.org/10.1108/BIJ-11.2021-0663>, 2024.
- [10] A. P. S. I. L. & T. M. Iazzi, "Communicating the stakeholder engagement process: A cross-country analysis in the tourism sector. Corporate Social Responsibility and Environmental Management," Vols. 27(4), p. 1642–1652. <https://doi.org/10.1002/c>, 2020.
- [11] M. & P. F. Morsing, "CSR in SMEs: do SMEs matter for the CSR agenda?," *Business Ethics: A European Review*, vol. 18(1), pp. 1–6. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8608.2009.01544.x>, 2009.
- [12] H. & K. M. Jun, "From stakeholder communication to engagement for the sustainable development goals (Sdgs): A case study of lg electronics. Sustainability (Switzerland)," vol. 13(15). <https://doi.org/10.3390/su13158624>, 2021.
- [13] F. & S. J. W. Bridoux, "(2022). Stakeholder theory, strategy, and organization: Past, present, and future.," *Strategic Organization*, Vols. 20(4), p. 797–809. <https://doi.org/10.1177/14761270221127628>, 2022.
- [14] M. S. & S. T. V. L. Goodman, "The science of stakeholder engagement in research: classification, implementation, and evaluation.," *Translational Behavioral Medicine*, Vols. 7(3), pp. 486–491. <https://doi.org/10.1007/s13142-017-0495-z>, 2017.
- [15] A. B. Carroll, "A History of Corporate Social Responsibility: Concepts and Practices.," *In The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*, no. July 2016, p. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199211593.003.0002>, 2009.

- [16] S. S. M. A. S. & K. D. N. Karimi, "Stakeholder Engagement in Monitoring and Evaluation and Performance of Literacy and Numeracy Educational Programme in Public Primary Schools in Nairobi County, Kenya," (2020). *Stakeholder Engagement in Monitoring and Evaluation and Performance of Literacy and Numeracy Educational PJournal of Educational and Development*, vol. 10(2), p. 10. <https://doi.org/10.5539/jedp.v10n2p10>, 2020.
- [17] W. K. & L. L. S. H. J. Kristina, "Model Sosial Bisnis Paguyuban Pengepul Sampah Mandiri.," pp. 8(3), 161–171., 2020.
- [18] K. & P. I. A. Kushadajani, "Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Desa: Peran Kepemimpinan Lokal dalam Perspektif Relasi Antar Aktor," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 5(1), p. 70–80. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i1.7318>, 2020.
- [19] S. M. & B. A. Mukhtar, "An integrative framework for stakeholder engagement: reconciling and integrating stakeholders' conflicting CSR priorities in management decision-making.," *Journal of Decision Systems*, Vols. 31(4), , p. 407–432., 2020.